AIR BAKU

Kualitas Makin Rendah

Berbau, keruh, dan tidak lancar adalah keluhan yang paling sering disampaikan konsumen Perusahaan Daerah Air Minum. Bahkan, ada pelanggan yang memperoleh air PAM lebih kotor daripada air bekas cucian.

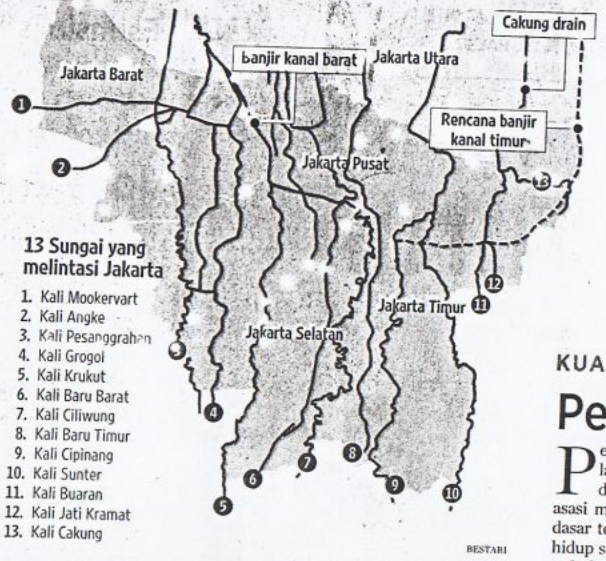

BESTARI

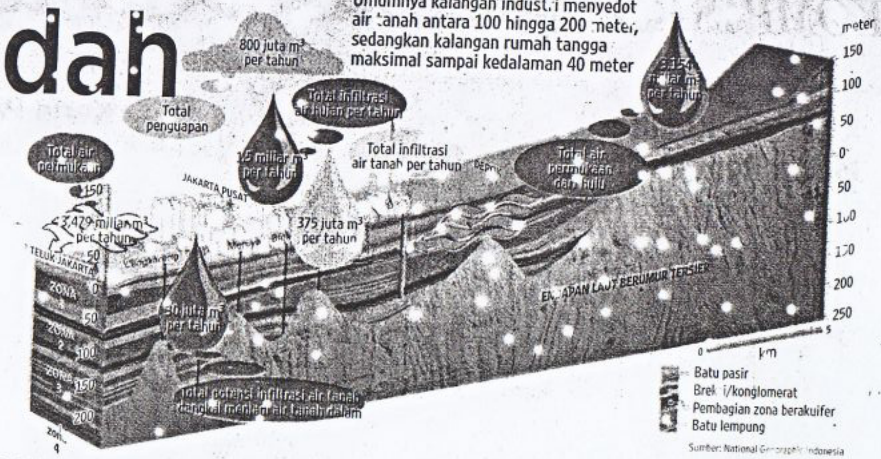

Ini tidak sesuai dengan janji pelayanannya yang seharusnya memenuhi standar air minum," kata Koordinator Advokasi Air Minum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Karunia Asih Rahayu, Selasa (5/7).

Direktur Utama PAM Jaya Maurits Napitupulu menyalahkan mitra swasta sebagai penyebab rendahnya kualitas air yang didapat pelanggan. Maurits menilai, mitra swasta PAM Jaya tidak berupaya mencari terobosan untuk mengatasi kekurangan air. "Tidak ada inovasi teknologi yang dilakukan untuk mencari alternatif sumber air baku yang terbatas," kata Maurits.

Mencari air baku untuk keperluan air minum warga Jakarta dari hari ke hari semakin berat. Dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta, tidak satu pun yang berkategori layak sebagai sumber air minum.

Akibatnya, kebutuhan air baku harus dicari dari luar wilayah DKI Jakarta, yaitu dari Waduk Jatiluhur dan Tangerang. Menurut Manajer Kampanye Air dan Pangan Eksekutif Nasional Walhi M Islah, secara ekologi hal itu mengindikasikan kondisi kota Jakarta sangat memprihatinkan. "Kota ini sudah tidak mampu menghidupi dirinya sendiri," kata Islah.

Ia mencontohkan Tarum Barat, saluran induk yang menjadi salah satu sumber air baku PDAM, mengalami degradasi dari sisi kuantitas maupun kualitas. Aktivitas industri dan rumah tangga menyumbang porsi cukup besar terhadap penurunan kualitas air. Hanya 400 dari sekitar 4.000 industri di Jakarta yang mengelola limbahnya. Minimnya sistem sanitasi di Jakarta mengakibatkan limbah seluruhnya dibuang ke sungai. Rendahnya kualitas air Tarum Barat, antara lain, ditunjukkan dengan tingginya konsentrasi deterjen.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Walhi, konsentrasi deterjen dalam air baku naik signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 1998 konsentrasi deterjen tercatat 0,12 mg/l dan menjadi 0,17 mg/l setahun berikutnya. Padahal, standar konsentrasi deterjen adalah 0,05 mg/l. "Bandingkan dengan kondisi tahun 1994 di mana konsentrasi deterjen hanya 0,016 mg/l," kata Islah.

Kualitas air baku yang semakin berkurang berdampak pada biaya produksi yang semakin mahal karena bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan semakin banyak. Bahan kimia pembersih yang digunakan, antara lain, aluminium sulfat dan poli aluminium klorida sebagai zat koagulan. Selain itu, ada juga pemercepat koagulan Sudlok C dan penetral berupa kapur tohor.

Direktur Teknik PAM Jaya Sri Wijayanto mengatakan, biaya bahan kimia yang dibutuhkan mencapai 30 persen dari total biaya produksi yang sekitar Rp 1.250 per meter kubik.

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengategorikan Ciliwung sebagai tercemar berat. "Pemerintah DKI Jakarta ingin agar Ciliwung dinaikkan kelasnya supaya bisa dipakai sebagai sumber air baku, tetapi tidak ada dukungan dari pemerintah daerah yang menangani daerah hulu," kata Islah.

Islah mengatakan, rendahnya kualitas air harus diatasi dengan pemulihan secara integratif dari hulu ke hilir. Pemulihan di hulu mencakup pemulihan daerah tangkapan air, seperti daerah Bogor. Adapun pemulihan di hilir mencakup rehabilitasi badan air sungai-sungai yang melewati wilayah Jakarta.

"Sangat disayangkan, pemerintah justru mengambil langkah pragmatis,, yaitu dengan membuat jalur pipa dari Waduk Jatiluhur ke Jakarta. Langkah ini hanya berdampak jangka pendek," kata Islah.

(DOT)

KUALITAS AIR

Persoalan Ada di Hulu

Perserikatan Bangsa-Bangsa, setahun lalu, mendeklarasikan, akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia mendasar. Pemenuhan hak dasar tersebut esensial untuk penikmatan hidup secara utuh.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menyetujui deklarasi tersebut. Meski begitu, pemenuhan hak dasar atas air bersih, apalagi air minum, masih jauh dari terpenuhi, bahkan di Jakarta, ibu kota negara. Dengan populasi penduduk menurut Sensus Penduduk 2010 sebanyak 9,6 juta jiwa (2,2 juta keluarga), sementara jumlah total penduduk harian Jakarta yang membutuhkan layanan air minum mencapai 12,5 juta jiwa, pertumbuhan Jakarta sudah melewati daya dukungnya.

"Pelayanan air bersih memakai pipa baru mampu melayani 44 persen total populasi," papar Firdaus Ali, PhD dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Itu pun dengan tingkat kebocoran tinggi, mencapai 50,6 persen.

Di luar itu, Jakarta juga kesulitan air baku sebagai bahan dasar air minum. Meski dialiri 13 sungai atau kali dan ada 43 situ, semua dalam kondisi rusak dan tercemar sehingga, menurut Firdaus yang juga anggota Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta, tidak layak digunakan sebagai air baku air minum di Jakarta.

Akibatnya, air yang dialirkan perusahaan air minum di Jakarta juga tidak berkualitas air minum meski menyebut diri perusahaan air minum. Meski begitu, harga rata-rata air olahan yang dipasarkan perusahaan air minum di Jakarta relatif tinggi, Rp 7.224 per meter kubik.

Karena layanan tak memadai itu, penggunaan air tanah menjadi praktik yang banyak dilakukan rumah tangga serta tempat bisnis dan industri. Industri biasanya mengambil air tanah dalam, 100-200 meter di bawah permukaan tanah. Sementara rumah tangga biasanya mengambil air tanah paling dalam hingga 40 meter. Dampaknya adalah penurunan tanah yang berakibat memperburuk banjir Jakarta pada musim hujan. "Di utara, kenaikan air laut akibat pemanasan global jadi ancaman nyata," ungkap Firdaus.

Pokok persoalan penyediaan air minum Jakarta terletak pada rendahnya komitmen pemerintah pusat memenuhi hak dasar warga. Hal itu tecermin dari tidak adanya pengelolaan yang sungguh-sungguh dan terpadu atas sumber air baku, yaitu sungai."Pemerintah bisa menyubsidi komoditas yang bukan kebutuhan dasar, seperti BBM, tetapi tidak punya komitmen pada penyediaan air bersih," kata Firdaus. Hampir semua daerah aliran sungai di hulu hingga hilir rusak sehingga potensi tangkapan air rendah. Saat musim hujan banjir dan saat musim kemarau debit air turun. Situasi itu diperburuk perilaku warga dan lemahnya pengawasan sehingga rumah tangga dan industri leluasa membuang limbah ke sungai. Akibatnya, kualitas air baku terus turun.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo mengatakan, air minum selalu masuk lima besar jumlah keluhan yang masuk ke YLKI. Kebanyakan tentang kualitas air, seperti keruh, air tidak mengalir pada waktu diperlukan, dan yang sekarang banyak dikeluhkan adalah pengubahan golongan tarif. Golongan rumah tinggal yang digunakan usaha langsung diubah menjadi tempat usaha, begitu juga rumah bertingkat. Padahal, usaha yang dijalankan di rumah bisa berupa warung kecil, sementara tidak semua rumah tingkat mewah.

"Inti persoalan air minum bukan pada kualitas layanan, melainkan di hulu. Banyak persoalannya, dari jeratan utang ke Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia hingga ketidakmampuan pemda bernegosiasi dalam kontrak dengan investor, terutama yang asing," papar Sudaryatmo.

Firdaus juga menyebut, pinjaman yang diberikan Bank Dunia dalam kerangka memprivatisasi perusahaan milik negara/daerah menyebabkan banyak perusahaan air minum daerah terjerat utang. "Banyak pemda datang berkonsultasi ke YLKI saat akan menaikkan tarif. Ketika kami membahas lebih dalam, ternyata kenaikan tarif itu tidak untuk memperbaiki layanan, tetapi membayar utang," kata Sudaryatmo. Namun, di Malang, pemerintah kota menghitung, investasi air minum lebih murah jika dibiayai bank lokal karena bunganya lebih murah. "Bank Dunia menetapkan bunga 3 persen, tetapi karena pemerintah pusat tidak mau menjamin, risiko dibebankan ke perusahaan air minum daerah sehingga bunga jadi 11 persen," paparnya.

Dalam kasus PDAM Jaya, Sudaryatmo mencontohkan kontrak dengan operator. Operator meminta jaminan penerimaan (*water charge*) berupa kenaikan tarif otomatis. Di sisi lain, PDAM Jaya tidak memasukkan klausul syarat tingkat mutu pelayanan dan sanksi jika operator tidak bisa menekan tingkat kebocoran air.

(NINUK MP)